



---

---

## Pengaruh *Islamophobia* Terhadap *Human Security* Imigran Muslim di Denmark

I Putu Surya Adhi Pradana Putra <sup>1)</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini <sup>2)</sup>, Adi Putra Suwecawangsa <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana *islamophobia* memberikan pengaruh terhadap *human security* imigran muslim yang berada di Denmark dari tahun 2017 hingga tahun 2019. *Islamophobia* sendiri merupakan isu diskriminasi yang sudah ada sejak lama dan kerap kali terjadi di negara-negara yang tidak memiliki umat muslim sebagai mayoritas penduduknya. Denmark merupakan salah satu negara dimana *islamophobia* masih terjadi karena adanya perbedaan etnis dan identitas. Pelaku diskriminasi terhadap warga muslim bukan hanya dari warga sipil Denmark, melainkan juga dari politisi serta Pemerintah yang sedang menjabat. Sejak kejadian 9/11, *Islamophobia* mulai berkembang di Denmark khususnya karena doktrin dari partai sayap kanan yang berideologi nasionalis yang mulai memegang kekuasaan di Denmark sesaat pasca kejadian tersebut. Hingga tahun 2019, banyak peristiwa yang berlatar belakang *islamophobia* yang terjadi di Denmark, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, bahkan kebijakan yang dinilai menyudutkan dan merugikan warga muslim di Denmark yang merupakan minoritas terbesar disana. Tindakan-tindakan *Islamophobia* tersebut jelas menyudutkan dan memberikan ancaman terhadap keamanan umat islam di Denmark yang selalu menjadi korban. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dengan menggunakan kerangka teori *islamophobia* dan *human security*. Penelitian ini memberikan jawaban bahwa *islamophobia* yang berangkat dari pemahaman yang salah serta prasangka negatif terhadap islam yang kemudian menghasilkan output seperti tindakan diskriminasi yang dapat memberikan dampak ancaman terhadap *human security* bagi warga islam di Denmark.

**Kata-kunci** : Denmark, *Islamophobia*, *Human Security*, Muslim

### Abstract

*This study aims to provide an overview of how Islamophobia affects the human security of Muslim immigrants in Denmark from 2017 to 2019. Islamophobia itself is a discrimination issue that has existed for a long time and often occurs in countries that do not have Muslims as the majority of the population. Denmark is one of the countries where Islamophobia still occurs because of ethnic and identity differences. The perpetrators of discrimination against Muslims are not only from Danish civilians, but also from politicians and the current government. Since the incidents of 9/11, Islamophobia has started to develop in Denmark, especially because of the doctrine of the right-wing party with nationalist ideology which lead the Government in Denmark short*

*after the incident. Until 2019, a lot of islamophobic background accident took place in Denmark, including physical violence, verbal violence, and even policies that were considered to corner and harm Muslims in Denmark. These Islamophobic actions clearly corner and pose a threat to the security of Muslims in Denmark who are always become the victims. The data collected in this study were obtained from the results of a literature study using the theoretical framework of Islamophobia and human security. This study provides an answer that Islamophobia which departs from a wrong understanding and negative prejudice against Islam which then produces outputs such as acts of discrimination can affects and making a threat to human security for Islamic citizens in Denmark*

**Keywords :** *Denmark, Islamophobia, Human Security, Muslim*

**Kontak Penulis**

I Putu Surya Adhi Pradana Putra

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Denpasar, 80119

+6287785534413

Suryaadhip26@gmail.com

## PENDAHULUAN

Denmark merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia yang difokuskan di Denmark meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, menekan tingkat rasisme, hak anak, kekerasan, dan lain-lain. Meskipun begitu, Pemerintah Denmark pada tahun 2018 mengeluarkan kebijakan kontroversial, yakni *Ghetto Package* yang memiliki tujuan untuk mewujudkan Denmark tanpa masyarakat parallel atau menekan jumlah *Ghetto* pada tahun 2030. Sebuah area yang dihuni oleh 50 persen imigran dan keturunan non-barat dapat dijelaskan sebagai *ghetto* dengan kriteria seperti pendapatan, persentase orang yang bekerja, tingkat edukasi, dan proporsi masyarakat dengan jejak kriminal (Versi, 2020). Masyarakat Muslim di Denmark yang merupakan minoritas terbesar di Denmark menjadi target utama dari kebijakan tersebut.

Ada sekitar 300.000 penduduk muslim di Denmark di tahun 2017, termasuk imigran dan keturunannya (Jacobsen, 2018). Namun, angka tersebut masih perkiraan estimasi karena sistem hukum di Denmark yang melarang pendaftaran warga negaranya berdasarkan agama maupun etnisnya. Peningkatan tingkat imigrasi muslim di Denmark secara signifikan terjadi sekitar tahun 1960-an dengan karena adanya kedatangan tenaga kerja migran. Gelombang kedua imigrasi ke Denmark terjadi pada tahun 1980-an dengan alasan mencari suaka politik. Imigran gelombang kedua sebagian besar dari negara-negara mayoritas Muslim, seperti Iran, Timur Tengah, serta ada pula dari Afrika.

Perbedaan latar belakang, stigma negatif tentang Islam, dan posisi mereka sebagai imigran tentu saja mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim di Denmark. Sama seperti

di negara-negara Eropa lainnya, perkembangan tindakan ofensif yang ditujukan kepada masyarakat muslim di Denmark cenderung meningkat pasca kejadian 9/11. Pada tahun 2001, koalisi liberal-konservatif berkuasa di Denmark setidaknya sampai 10 tahun setelahnya. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh *Danish People's Party* (DPP) yang merupakan partai nasionalis anti-imigrasi untuk memanfaatkan peristiwa 9/11 untuk kemudian membentuk sentimen terhadap Muslim dengan harapan meningkatkan paham anti-imigrasi dibalut *Islamophobia* pada masyarakat Denmark. Selain itu, isu identitas serta kepemilikan yang sarat dengan konotasi rasisme yang telah berlangsung sejak lama di Eropa kembali dikembangkan oleh DPP. Masyarakat Muslim dianggap sebagai ancaman bagi identitas Denmark dan mendorong stigma-stigma negatif terhadap masyarakat Muslim. Adanya perkembangan dan banyaknya stigma negatif terhadap Islam di Denmark yang kemudian memunculkan tindakan-tindakan berupa diskriminasi dan kekerasan dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi keamanan masyarakat Muslim disana.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan "bagaimana *Islamophobia* memberikan pengaruh terhadap *Human Security* imigran Muslim di Denmark". Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan 2 konsep yakni *Islamophobia* dan *Human Security*. *Islamophobia* dapat dijelaskan sebagai penolakan terhadap Islam, kelompok Muslim, dan individu Muslim atas dasar prasangka dan stereotip yang kemungkinan memiliki elemen emosional, kognitif, dan evaluatif serta memiliki orientasi berupa tindakan berupa diskriminasi dan kekerasan (Stolz, 2005). *Human Security* akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana ancaman yang diberikan oleh tindakan-tindakan diskriminatif dan kekerasan

memberikan dampak kepada individu dan kelompok masyarakat Muslim.

Penelitian ini menggunakan 2 literatur sebagai kajian pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Literatur pertama memiliki judul *The Effect of Islamophobia on The Security of Syria Refugees in Germany* karya Anton Minardi dan Feronika Melinda tahun 2020. Literatur ini menjelaskan bagaimana awal dari masuknya pengungsi dari Syria ke Jerman secara masif dan kemudian menjadi salah satu perdebatan dan masalah dalam kehidupan masyarakat di Jerman. Awalnya Jerman merupakan salah satu negara yang memiliki solidaritas dan rasa kemanusiaan yang tinggi untuk kemudian menerima dan mempersilahkan pengungsi dari beberapa negara, terutama negara di wilayah Timur Tengah. Alasan Jerman melakukan hal tersebut dikarenakan rasa tanggung jawabnya atas penderitaan banyak orang karena kepemimpinan Hitler. Rasa tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam Undang Undang Dasar Jerman Pasal 16A yang menyatakan bahwa siapapun yang melarikan diri dari penindasan politik memiliki Hak untuk mengungsi di Jerman.

Literatur ini juga membahas terbentuknya Pegida (*Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes*) atau dalam bahasa Inggris disebut *Patriotic Europeans Against the Islamisation of the Occident* tahun 2014 yang merupakan kelompok yang menolak islamisasi yang didirikan di Dresden, Jerman. Pegida sendiri beranggotakan orang-orang anti-Islam yang menolak pencari suaka dan pengungsi serta merupakan kelompok gerakan sayap kanan. Kelompok ini memiliki ketakutan akan konflik sosial yang akan muncul dimasa yang akan datang karena adanya orang-orang Timur di Barat (Eropa), serta mereka memiliki ketakutan akan Islam yang akan mengubah nilai

nilai dan budaya Jerman dengan nilai-nilai dan budaya Islam yang dibawa oleh pengungsi tersebut. Pegida berkembang sangat pesat dari saat didirikannya, serta mendapat dukungan dari Partai Politik yakni AFD (*Alternative for Germany*). Kelompok Pegida tersebut dijelaskan telah melakukan beberapa kekerasan pada para pengungsi Muslim serta melakukan beberapa perusakan dan pembakaran di beberapa Masjid dan kamp pengungsi dan memakan banyak korban. Literatur ini memberikan gambaran bagaimana *Islamophobia* dapat muncul di dalam masyarakat yang kemudian memberikan dampak yang sangat besar, terutama bagi masyarakat Islam dan pengungsi. Dampak yang dihasilkan kemudian menjadi ancaman keamanan bagi para pengungsi Muslim.

Literatur kedua berjudul *Islamophobic Trends in Europe* karya Marwan Mohammed tahun 2014. Literatur tersebut menjelaskan bahwa penolakan terhadap Muslim di Eropa telah berlangsung lama dan terus berkembang. Beberapa kejadian terkait seperti jatuhnya tembok Berlin tahun 1989, 9/11 di New York, pengeboman di Madrid tahun 2004, serta pengeboman di London tahun 2005 telah membawa ekspresi baru terhadap *Islamophobia*. Masyarakat Uni Eropa, khususnya yang berada di sepanjang Laut Mediterania memiliki hubungan erat dengan Muslim dan Islam, serta tidak sedikit yang kemudian memeluk agama Islam. Terlepas dari banyaknya warga Eropa yang beragama Islam, kehadiran umat Muslim di Eropa yang berkaitan dengan Imigrasi menjadi faktor pendorong berkembangnya *Islamophobia*. Terlepas dari beragamnya situasi regional dan nasional, penolakan terhadap Islam telah menyebar cepat pada pertengahan tahun 90-an dan berkontribusi terhadap reorganisasi ideologis.

Partai dan gerakan sayap kanan menjadi salah satu pendorong kuat komponen anti-Islam dan

membawa teori Islamisasi di Eropa dan diwujudkan dengan *The Alliance of European National Movements* yang dibentuk tahun 2009 yang berisikan partai-partai sayap kanan di Eropa. AENM membuat Teori Islamisasi yang menyatakan bahwa umat Islam yang jumlahnya kian meningkat memiliki potensi dan berniat untuk menghapus budaya nasional secara bertahap. Beberapa bentuk dari gerakan politik *Islamophobia* ini memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun dan cenderung stabil di berbagai negara di Eropa. *Swiss People Party* menjadi salah satu partai yang berada dibalik inisiatif referendum yang kemudian menolak pembangunan Masjid tahun 2009 di Swiss. Partai tersebut memasukan komponen anti-Islam yang kuat dalam ideologi partainya, dan hal tersebut sejalan dengan mobilisasi teori Islamisasi Eropa di tingkat supranasional. Di Denmark sendiri, ada *Danish People Party* yang juga menjadi salah satu partai sayap kanan yang membawa wacana anti-Islam di dalam ideologi partainya.

Konstruksi “Masalah Muslim Eropa” ini memerlukan solusi yang memberikan efek khusus pada kehidupan Muslim. Tanggapan yang sesuai dengan penafsiran “masalah Muslim” di tiap daerahnya berbeda-beda, titik fokus budaya politik nasional sangat terkait dengan perannya sebagai perantara komunitas. Seperti contohnya di Italia, “masalah Muslim” diekspresikan secara langsung dengan *xenophobia*. Sedangkan di Prancis, tanggapan terhadap “masalah Muslim” adalah pelarangan jilbab di sekolah umum, dan pelarangan niqab di seluruh area publik. Tidak ada solusi “standar” secara global, dan di Eropa sendiri terdapat banyak bentuk dari penolakan dan diskriminasi terhadap populasi Muslim dari berbagai asal negara imigran. Literatur ini memberi gambaran bagaimana tren *Islamophobia* muncul dengan disertai oleh Gerakan sayap

kanan serta kerangka umum yang menjelaskan alasan atas hal tersebut, identifikasi dari “masalah Muslim”, dan hasil survei tahun 2010 yang menjelaskan penolakan Islam di beberapa negara di Eropa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder berupa buku, media *online*, dan jurnal-jurnal. Penelitian ini menggunakan tingkat analisis kelompok yang biasanya memiliki kaitan dan berpengaruh terhadap kebijakan yang akan ditentukan oleh negara dalam suatu kasus. Dengan digunakannya tingkat analisis kelompok maka penelitian ini akan memiliki fokus pada dua kelompok, yakni kelompok masyarakat Denmark serta kelompok imigran muslim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Masuknya Islam ke Denmark

Sejak tahun 1960-an, Denmark mulai mengalami perpindahan penduduk melalui imigrasi yang berasal dari negara non-barat. Banyaknya pekerja yang datang ke Denmark membuat Pemerintah Denmark melakukan pembatasan imigrasi pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Hal tersebut dilakukan sebagai tanggapan dari krisis minyak dan pencegahan pengangguran yang masif. Setelah tahun 1973, Denmark kembali menerima pekerja asing yang masuk melalui imigrasi. Pekerja asing tersebut rata-rata berasal dari negara Turki, Pakistan, dan Yugoslavia. Denmark kembali membutuhkan pekerja tamu atau pekerja asing dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan rendahnya tingkat pengangguran di Denmark. Akibat imigrasi, jumlah warga negara asing yang berasal dari negara-negara non-barat di Denmark menjadi meningkat pesat. Sebagai contoh, di tahun 90-an jumlah warga negara dari Turki yang tinggal di Denmark meningkat

empat kali lipat pada periode yang sama, sedangkan warga asing yang berasal dari Pakistan meningkat sebanyak dua kali lipat. Jumlah total dari warga negara asing yang berasal dari negara-negara non-barat yang tinggal di Denmark meningkat sebanyak lima kali lipat.

### **Perkembangan *Islamophobia* di Denmark**

*Islamophobia* selalu menjadi topik yang sering terdengar maupun diberitakan oleh media, khususnya setelah kejadian 9/11. Eropa juga tak luput dari isu terkait *Islamophobia*, khususnya jika berhubungan dengan imigran. Denmark menjadi salah satu negara yang memiliki isu terkait *Islamophobia*, walaupun negara tersebut memiliki kesan yang damai dan toleran. Pada tahun 2001, koalisi Liberal-Konservatif berkuasa di Denmark dan akan bertahan selama 10 tahun kedepan. DPP atau *Danish People's Party* yang merupakan salah satu partai yang menduduki parlemen terbanyak memanfaatkan momentum tersebut untuk melaksanakan tujuannya. DPP sendiri dikenal sebagai partai nasionalis dan anti-imigrasi. Dengan kedudukan yang strategis di parlemen dan kejadian 9/11, DPP mulai menumbuhkan isu-isu sentimen anti-imigrasi dan *Islamophobia* di Denmark. Rasisme telah berlangsung cukup lama di Eropa, DPP membungkus wacana *Islamophobia* itu dengan klaim identitas, kepemilikan, serta modernitas untuk meraih simpati masyarakat Denmark. Menurut *Social Democrat Party* di tahun 2017, umat Islam dianggap dapat mengganggu kohesi sosial dan menyebabkan benturan budaya, serta menurut DPP Muslim tidak dapat berintegrasi (*European Islamophobia Report 2017, 2018*). Partai yang berideologi sayap kanan telah berhasil secara resmi mengkategorikan kelompok masyarakat berdasarkan "Barat" dan "Non-Barat". Upaya menyamakan *Islamophobia* dilakukan dengan cara meresmikan frasa barat dan non-barat, hal tersebut ditunjukkan karena

sebagian besar negara yang dianggap non-barat oleh pemerintah Denmark adalah negara mayoritas Muslim. Pengkategorian non-barat tersebut semakin menciptakan jarak di dalam masyarakat khususnya masyarakat Denmark dan imigran Muslim beserta keturunannya serta kemudian membentuk masyarakat paralel. Komunitas masyarakat Muslim semakin terlihat berbeda dalam kehidupan sehari-hari dengan komunitas masyarakat hegemonik dengan adanya narasi masyarakat paralel.

### ***Islamophobia* di Denmark Tahun 2017**

Pada awal tahun 2017, partai sayap kanan yakni DPP yang sedang berada di Pemerintahan Denmark mencoba untuk melarang ruang Salat di lembaga-lembaga publik, sehingga mempersulit pelajar Muslim untuk melakukan kegiatan ibadahnya. Pada bulan Februari tahun 2017, partai DPP memelopori sebuah pengajuan RUU di Parlemen, RUU tersebut berisikan pendefinisian imigran non-Barat serta keturunannya sebagai non-Denmark dan meminta Pemerintah untuk mengurangi jumlah pencari suaka yang ingin datang ke Denmark secara drastis. Seorang Professor bernama Uffe Østergaard yang dulunya merupakan salah satu orang yang menyambut masuknya imigran, namun pada tahun 2017 beliau berpendapat Muslim harus menjadi Lutheran, atau kita kacau (Østergaard, 2017). Hal tersebut menjadi salah satu pembuka perubahan paradigma politik dengan mengangkat isu Muslim.

Pada Desember 2016, terdapat pengesahan daftar sanksi Nasional atau yang dikenal dengan "*Hate Preacher List*" yang merupakan daftar pengkhotbah agama yang dilarang untuk memasuki Denmark selama 2 tahun. Sanksi Nasional tersebut kemudian mulai dipraktikan pada pertengahan 2017. Menurut layanan Imigrasi Denmark, Undang-Undang tersebut merupakan hasil dari kesepakatan politik tentang inisiatif yang berkaitan dengan

pengkhotbah agama yang berusaha untuk melemahkan hukum dan nilai-nilai Denmark. Daftar tersebut meliputi banyak nama-nama pemuka agama Islam.

Sebuah survei di Denmark yang dilakukan oleh suatu Lembaga bernama Megafon menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh Muslim di Denmark menyatakan bahwa sikap terhadap Muslim di Denmark semakin memburuk selama 10 tahun terakhir. 37% dari mereka merasakan latar belakang mereka sebagai Muslim membuat mereka diremehkan. Sebanyak 33% merasa latar belakang mereka sebagai Muslim membuat mereka lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, serta 32% menyatakan bahwa mereka mendapatkan teguran dengan konotasi negatif atas penampilan fisik mereka (Megafon, 2017).

Pada April 2017, *The Board of Equal Treatment* menolak pengaduan sekelompok pelajar terkait larangan ibadah salat di lingkungan sekolah. Dewan tersebut menyatakan bahwa kegiatan salat di lingkungan sekolah atau kampus dapat menimbulkan kekhawatiran, konflik, dan kegelisahan yang besar bagi mahasiswa dan karyawan lainnya. Pada bulan Mei 2017, anggota partai *Danish People's Party* mengajukan petisi untuk pelarangan ruang salat di seluruh Lembaga Pendidikan publik. Tujuan dari petisi tersebut adalah untuk memastikan bahwa institusi pendidikan publik tidak akan mendukung islamisasi masyarakat Denmark.

Pada Februari 2017, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bernama Ali mengalami penyerangan dari 4 anak lain yang merupakan teman sekelasnya yang berupa pelemparan Molotov. Menurut kakak dari Ali, anak-anak tersebut sering melontarkan ucapan rasis dan hal-hal lain selama bertahun-tahun. Mereka menyuruh Ali untuk kembali ke negaranya serta memanggil Ali dengan sebutan-sebutan yang

merendahkan yang berhubungan dengan Muslim dan imigran. Contoh kasus lain terjadi pada saat setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Seorang pemuda berusia 16 tahun bernama Tarek ikut serta dalam demonstrasi yang dilakukan di depan Gedung Kedutaan AS. Pada saat itu, Tarek dan temannya diserang oleh 7 polisi. Polisi berlari ke arah mereka lalu menendang Tarek serta mendorongnya ke tanah, saat itu polisi-polisi tersebut juga meneriakkan "Muslim babi" dan "Muslim bodoh" (Politivold Mod, 2017).

### **Islamophobia di Denmark Tahun 2018**

Konsep Islam dan Muslim di tahun 2018 menjadi semakin kontra dengan kesatuan masyarakat Denmark. Pergerakan politik serta media membuat retorika yang menciptakan citra yang buruk bagi Islam melalui debat politik yang dilakukan secara publik. Hal tersebut memberikan kontribusi pada pendekatan kearah kebencian terhadap umat Muslim di ruang publik beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut juga secara tidak langsung dapat "melegalisasi" serangan verbal yang ditujukan kepada umat Muslim. Parlemen Denmark membuat skema baru terkait kuota migrasi pada tahun 2017 yang sekaligus termasuk penentuan jumlah pengungsi yang dapat dimukimkan setiap tahun di Denmark. Menteri Imigrasi dan Integrasi Denmark pada tahun 2018 mengumumkan bahwa tahun itu Denmark tidak akan menerima pengungsi yang dipilih oleh kuota dari PBB. Meskipun pengungsi yang dipilih belum tentu Muslim, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas pengungsi yang masuk ke Denmark berasal dari negara-negara Muslim.

Salah satu insiden fisik yang bermotif agama terjadi pada Oktober 2018. Seorang wanita yang menggunakan cadar mengalami perundungan oleh beberapa pria di salah satu supermarket di Denmark. Pria-pria tersebut mengatakan bahwa

wanita tersebut jelek dan harus kembali ke negaranya. Selanjutnya wanita tersebut didorong oleh pria-pria tersebut kemudian dia diminta untuk meninggalkan supermarket oleh salah satu karyawan. Wanita tersebut telah melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut ke kepolisian, namun penyelidikan dihentikan pada bulan November dengan alasan tidak mungkin untuk mengidentifikasi para pelaku. Alasan penghentian penyelidikan tersebut tampak aneh karena pihak kepolisian memiliki bukti video asli yang menampilkan seluruh wajah pelaku dan tanpa sensor.

Malte Dahl dan Niels Krog dari Universitas Kopenhagen melakukan suatu penelitian dengan memasukan 800 lamaran pekerjaan fiktif ke 400 lamaran pekerjaan asli, dengan nama wanita dan pria berdasarkan minoritas dan mayoritas dengan masing-masing jumlah yang sama. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelamar kerja fiktif dengan nama yang terdengar seperti orang dari Timur Tengah harus mengirim 52% lebih banyak lamaran untuk mendapatkan undangan wawancara kerja, meskipun mereka memenuhi syarat dan cocok untuk pekerjaan itu sama seperti pelamar fiktif dengan nama "Denmark". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam perekrutan pekerja berdasarkan stigma etnisitas di Denmark cukup tinggi.

Perancangan atau proposal di dalam Legislatif Denmark yang meliputi pembatasan kebebasan warga Muslim semakin meningkat tiap tahunnya, dan tahun 2018 tidak luput dari peningkatan tersebut. Menurut *Danish Documentation Center for Discrimination against Muslims*, sebuah proposal atau Undang-Undang dianggap diskriminatif terhadap Muslim dan membatasi kebebasan warga Muslim ketika latar belakang atau tujuan dari proposal atau Undang-undang tersebut ditujukan untuk Muslim. Sejak 2017, ada lebih dari 10 resolusi

yang diajukan dalam Parlemen yang ditujukan kepada umat Muslim di Denmark. Partai *Danish People's Party* merupakan salah satu partai yang sering mengajukan resolusi tersebut dan mencakup berbagai aspek termasuk gaya hidup umat Muslim. Undang-Undang yang paling sering dibahas dan dipraktikan pada tahun 2018 di Denmark adalah *Burqa Ban* atau pelarangan burqa. Banyak partai-partai yang mendukung larangan tersebut hingga akhirnya larangan tersebut resmi diberlakukan. Pelarangan penggunaan burqa tersebut memiliki sanksi denda sebesar 1.000 Kroner Denmark, dan denda tersebut dapat meningkat jika pelanggar melakukan pelanggaran lagi untuk kedua kali dan seterusnya.

Pada awal tahun 2018, Pemerintah Denmark memperkenalkan seperangkat Undang-Undang yang akan digunakan untuk mengatur kehidupan Muslim khususnya di daerah yang berpenghasilan rendah. Seperangkat Undang-Undang tersebut dikenal dengan nama "*Ghetto Package*". *Ghetto* sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan suatu daerah perumahan umum atau distrik di Denmark yang menurut Pemerintah memiliki masalah sosial dan mayoritas etnis non-Barat. *Ghetto Package* ini memiliki tujuan yakni "menyingkirkan" *Ghetto* pada tahun 2030, atau setidaknya berusaha mengurangi jumlah *Ghetto* hingga dibawah 40 persen di tahun 2030. Beberapa aturan di dalam Undang-Undang tersebut adalah mengatur wewenang pihak kepolisian untuk mendefinisikan bahwa suatu zona dapat dianggap sebagai wilayah yang mendapatkan peningkatan hukuman, atau penggandaan hukuman. Aturan tersebut memiliki maksud bahwa jika masyarakat yang ada di daerah yang ditentukan tersebut melakukan pelanggaran hukum seperti kekerasan, narkoba, vandalisme, dan pelanggaran hukum lainnya, maka pelaku

dapat dijatuhi hukuman dua kali lipat dari yang seharusnya. Selain itu, ada juga aturan yang mengatur program pra-sekolah wajib yang mewajibkan penitipan anak di siang hari bagi anak berusia diatas satu tahun yang berasal dari wilayah *Ghetto* dengan selama 25 jam seminggu. Pemerintah dapat menghentikan tunjangan anak jika orang tua menolak untuk mematuhi aturan penitipan anak tersebut. Undang-Undang ini juga mencakup pengurusan perumahan nirlaba, pelarangan burqa, dan *The Roma Law* yang dapat menjadikan tunawisma sebagai kriminal ketika tidur diluar "*camp*" yang ditentukan karena dinilai dapat mengganggu dan meresahkan lingkungan sekitar. Pemerintah Denmark mengklaim bahwa *Ghetto* atau masyarakat paralel terisolasi secara fisik dan mental serta mengikuti aturan dan normanya sendiri tanpa kontak dengan masyarakat Denmark dan tidak berkeinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat Denmark.

### **Islamophobia di Denmark Tahun 2019**

Pada Pemilu yang diadakan pada tahun 2019, partai kiri-tengah (*centre-left*) mendapatkan mayoritas kursi di Parlemen. Kaum minoritas dan aktivis anti-rasisme memiliki harapan yang tinggi atas kemenangan tersebut dan berharap wacana politik tidak lagi menyinggung etnis khususnya dengan konotasi yang negatif. Namun pada kenyataannya, umat Muslim masih tetap mendapatkan stigma politik dan rasisme anti-muslim pada tahun 2019. Partai Sosial Demokrat Denmark tetap berjanji untuk melanjutkan kebijakan imigrasi yang keras dan melawan "masyarakat paralel" (yang merujuk pada kaum Muslim).

Pada tahun 2019, Professor Jørgen Goul Andersen melakukan sebuah survei dengan melibatkan lebih dari 5.900 warga Denmark. Survei tersebut memiliki fokus yakni sentimen masyarakat Denmark terhadap imigrasi.

Kesimpulan dari survei tersebut adalah sekitar 28 persen masyarakat Denmark setuju bahwa imigran Muslim harus dideportasi. Jika angka tersebut dikonversikan sebagai indikator masyarakat Denmark secara umum, maka sekitar seperempat warga Denmark memiliki pandangan yang secara signifikan merugikan umat Muslim di Denmark serta menyebabkan mereka mendukung pembatasan hak-hak sipil umat Muslim di Denmark.

Setelah diresmikannya pelarangan penggunaan burqa di tahun 2018, pada tahun 2019 mulai terjadi banyak penyerangan baik verbal maupun fisik yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap wanita yang menggunakan burqa di tempat umum. Pada April 2019, seorang wanita berusia 17 tahun yang menggunakan jilbab mendapatkan serangan dari seorang pria Denmark, pria tersebut meneriakinya dengan hinaan-hinaan rasis lalu merobek jilbabnya, menendang dan memukuli wanita tersebut beberapa kali hingga akhirnya seorang pria lain mencoba untuk melindungi wanita tersebut. Pada akhir 2018, seorang wanita Muslim lainnya yang menggunakan burqa mendapatkan serangan secara verbal oleh beberapa pria di toko kelontong. Wanita tersebut akhirnya membawa kasus tersebut pada Kejaksaan Negara Bagian pada Januari 2019. Namun setelah peninjauan dilakukan, Jaksa berpendapat bahwa wanita tersebut tidak "diancam" oleh para pria yang menyerangnya (menurut § 266 dalam Hukum Pidana Denmark) dan karena itu, jaksa tidak dapat menuntut hukuman denda pada kasus tersebut. Pengacara dari wanita tersebut berpendapat jika tindakan yang dianggap sebagai kejahatan rasial tersebut diabaikan oleh Kejaksaan, maka dapat mendorong masyarakat untuk main hakim sendiri terhadap wanita yang menggunakan niqab.

## Ancaman Human Security Muslim di Denmark

*Human security* secara luas dapat didefinisikan sebagai *freedom from fear* dan *freedom from want*. Ada dua aspek juga yang dapat mencirikan *Human Security*, Aspek yang pertama adalah keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penindasan, dan penyakit. Aspek yang kedua adalah perlindungan diri dari gangguan yang terjadi secara tiba-tiba dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari, baik di dalam rumah, dalam pekerjaan, maupun dalam masyarakat (UNDP, 1994). *Freedom from want* bisa didefinisikan sebagai perlindungan bagi individu sehingga individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, hingga mata pencaharian. *Freedom from fear* dapat didefinisikan seperti perlindungan terhadap individu yang ditujukan kepada keamanan dan integritas fisik, serta mencakup berbagai bentuk kekerasan yang mungkin timbul dari luar negara, tindakan suatu negara terhadap warga negaranya, tindakan suatu kelompok kepada kelompok lain, dan tindakan individu pada individu lain. Dalam kasus *Islamophobia* yang terjadi di Denmark, masyarakat Muslim di sana tidak mendapatkan fasilitas dalam perlindungan *human security* yang baik dari Denmark. Denmark sebagai negara yang seharusnya bertanggung jawab atas *human security* masyarakatnya, cenderung malah menjadi salah satu pihak yang ikut memojokkan dan menekan kebebasan masyarakat muslim di sana melalui kebijakan-kebijakan serta undang-undang yang berlaku. Penindasan dan gangguan secara tiba-tiba di tempat umum bagi masyarakat muslim di Denmark sering terjadi dengan alasan latar belakang baik dari tempat asal maupun karena identitas mereka sebagai seorang muslim. Selain *freedom from fear* dan *freedom from want*, indikasi adanya pengaruh *Islamophobia* terhadap *human security* masyarakat

Muslim di Denmark juga dapat digambarkan dengan komponen *human security* serta ancaman-ancamannya. UNDP menjelaskan tentang 7 komponen *human security*, yakni *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security*. Penelitian ini akan berfokus pada 2 komponen, yaitu *personal security* (keamanan personal) dan *community security* (keamanan komunitas) untuk memberi gambaran bagi dampak yang dihasilkan oleh tindakan serta *output Islamophobia* terhadap *human security* masyarakat muslim di Denmark.

### **Personal Security (Keamanan Personal)**

Aspek yang paling vital dalam keamanan manusia adalah keamanan mereka dari kekerasan fisik. Beberapa bentuk ancaman tersebut adalah ancaman dari penyiksaan fisik, ancaman dari negara lain (perang), ancaman dari kelompok lain (konflik etnis), ancaman dari individu atau grup lain, ancaman yang ditujukan kepada perempuan, ancaman terhadap anak-anak berdasarkan kerentanan mereka, ancaman terhadap diri sendiri (bunuh diri, narkoba). Dalam kasus Denmark, masyarakat Muslim seringkali mendapatkan ancaman personal berupa tindakan diskriminatif dengan bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Ali, seorang remaja dengan latar belakang Muslim yang mengalami pelemparan molotov oleh 4 orang siswa di sekolahnya. 4 siswa pelaku pelemparan molotov tersebut memang sering merundung Ali beberapa tahun kebelakang dengan alasan latar belakang Ali sebagai Muslim. Tarek, seorang remaja berusia 16 tahun yang diserang oleh beberapa polisi ketika ia sedang melakukan demonstrasi di depan Gedung Kedutaan AS di Denmark. Polisi-polisi tersebut juga meneriakkan kata "Muslim babi" dan "Muslim bodoh" saat penyerangannya terhadap Tarek.

Ancaman terhadap anak-anak memang tidak terjadi secara fisik di Denmark, namun banyak kebijakan maupun tindakan dari politisi Denmark yang menyasar secara spesifik anak-anak dari komunitas Muslim. *The Board of Equal Treatment* di bulan April tahun 2017 menolak pengaduan terkait pelarangan ibadah salat di lingkungan sekolah dari sekelompok pelajar. Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan Ibadah salat akan mengganggu mahasiswa dan karyawan sekitar. Kebijakan *Ghetto package* di tahun 2018 juga membawa seperangkat peraturan yang salah satunya mewajibkan anak-anak dari komunitas Muslim di Denmark untuk mengikuti program pra-sekolah. Anak-anak dari wilayah *ghetto* wajib dititipkan di tempat penitipan anak dan diberikan pembekalan terkait nilai-nilai Denmark. Denmark sebagai negara tidak dapat menerima perbedaan budaya tiap masyarakatnya, dan mewajibkan tiap masyarakat di Denmark termasuk orang-orang dengan latar belakang non-Denmark untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan budaya Denmark. Anak-anak dari komunitas Muslim akan besar dengan membawa nilai-nilai yang berbeda dari mayoritas masyarakat Denmark dan tidak jarang berlawanan dengan nilai-nilai yang ada di Denmark. Stereotip Muslim yang tidak menerima kesetaraan gender, tidak boleh memilih pasangan, kebebasan dalam hal seksual, semuanya dianggap menentang dasar nilai Denmark.

Selain kekerasan fisik, masyarakat Muslim di Denmark juga memiliki kesulitan dalam hal mendapatkan pekerjaan yang dikarenakan latar belakangnya sebagai Muslim. Malte Dahl dan Niels Krog sempat melakukan sebuah penelitian terkait peluang bagi orang-orang dengan latar belakang Muslim dalam melamar pekerjaan di Denmark. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelamar dengan latar belakang Muslim akan selalu memiliki peluang

yang lebih kecil dalam mendapatkan pekerjaan di Denmark. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa prasangka dan diskriminasi juga terjadi ketika melamar pekerjaan.

Contoh-contoh kasus tersebut memberi gambaran bahwa prasangka dan diskriminasi terhadap masyarakat Muslim oleh masyarakat Denmark dapat mendorong ke tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Tindakan kekerasan fisik tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksukaan mereka terhadap Muslim atau Islam. Hal tersebut juga menjadi contoh ancaman terhadap keamanan personal, yakni ancaman terhadap individu atau kelompok lain, ancaman dari konflik etnis, serta ancaman yang ditujukan kepada perempuan.

#### ***Community Security (Keamanan Komunitas)***

Banyak orang mendapatkan rasa aman mereka ketika berada didalam suatu keanggotaan kelompok, komunitas, keluarga, organisasi, kelompok ras dan etnis yang dapat memberikan mereka identitas serta seperangkat nilai-nilai. Bentuk kelompok-kelompok seperti itu dapat memberikan dukungan praktis bagi anggotanya yang berada dalam kondisi yang tidak baik. Di beberapa negara, konflik serta ketegangan antar etnis mulai meningkat. Nilai-nilai serta identitas yang dibawa oleh setiap kelompok etnis berpotensi untuk berseberangan dengan kelompok etnis lain, sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu faktor pendukung yang besar bagi perselisihan antar etnis. Ancaman bagi *community security* ini adalah konflik inter-etnis, serta perselisihan yang didasarkan pada nilai religius atau identitas antar kelompok.

Perselisihan antar etnis yang berbeda nilai religius dan identitas di Denmark ditunjukkan dari sikap masyarakat maupun Pemerintah Denmark terhadap masyarakat Muslim. Sejak peristiwa 9/11 dan partai sayap kanan yang memegang kekuasaan mayoritas di Parlemen

Denmark, sikap ketidaksukaan terhadap kelompok masyarakat Muslim mulai meningkat. Dari sisi Pemerintah khususnya politisi, banyak rancangan kebijakan maupun kebijakan yang berlaku yang tidak menguntungkan masyarakat Muslim di Denmark. Beberapa tindakan yang menggambarkan sentimen kelompok Masyarakat Denmark terhadap Muslim di Denmark salah satunya ditunjukkan oleh petisi pelarangan ruang Salat di semua institusi pendidikan publik yang diajukan oleh *Danish People's Party* di tahun 2017. Tujuan dari petisi tersebut adalah untuk mencegah adanya islamisasi di sekitar masyarakat Denmark. Kampanye yang bersifat ofensif terhadap Muslim juga salah satu bukti sentimen negatif terhadap Islam di Denmark. Kampanye yang bersifat ofensif terhadap Islam salah satunya dilakukan oleh politisi dari *Danish People's Party* di tahun 2018, kampanye tersebut memiliki seruan untuk melepaskan hijab dan menjadi bagian dari Denmark.

Pelarangan burqa dan *Ghetto package* juga menjadi contoh kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Denmark. pelarangan penggunaan burqa mulai diberlakukan pada tahun 2018 dengan sanksi denda sebesar 1.000 kroner dan ketika pelanggaran dilakukan secara berulang maka sanksi denda dapat meningkat diatas 10.000 kroner. Banyak pihak yang menyayangkan kebijakan ini, terutama kelompok masyarakat Muslim dan wanita Muslim di Denmark yang menggunakan cadar dalam kesehariannya yang sekaligus menjadi target utama dalam kebijakan tersebut. Demokrasi dianggap tidak lagi bekerja dengan baik, politisi Denmark selalu membanggakan kebebasan berekspresi ketika kasus karikatur Nabi Muhammad di tahun 2005 yang melukai hati banyak masyarakat Muslim di Denmark dan diseluruh dunia, namun di sisi lain mereka

juga melarang hak kebebasan berekspresi dan berpakaian wanita Muslim di Denmark dengan kebijakan pelarangan penggunaan burqa tersebut (Sarah, 2018). *Ghetto package* sendiri juga merupakan kebijakan yang resmi berlaku di tahun 2018 di Denmark. Masyarakat Muslim di Denmark yang merupakan minoritas terbesar menjadi target utama dalam kebijakan tersebut, bukan hanya imigran tetapi juga termasuk warga naturalisasi serta keturunan mereka yang lahir di Denmark. *Ghetto package* menjadi kebijakan kontroversial karena aturan-aturan yang ada didalamnya serta target kebijakan yang diatur dalam *Ghetto list*. Isi dalam kebijakan tersebut meliputi penggusuran dan pembongkaran suatu blok atau area ketika daerah tersebut tetap berada didalam *Ghetto list* selama 4 tahun berturut-turut dengan pengurangan hingga maksimum total penduduk 40 persen di tahun 2030 serta kewajiban untuk menitipkan anak di penitipan anak yang ditentukan untuk diajarkan nilai-nilai Denmark termasuk tradisi natal dan paskah di Denmark. Penduduk yang berasal dari daerah *Ghetto* juga mendapatkan kerugian lain dari kebijakan tersebut karena ketika mereka melakukan tindakan kriminal, maka mereka dapat dijatuhi hukuman 2 kali lipat lebih berat dari yang diatur dalam Undang-undang Denmark. Kebijakan *Ghetto package* dengan seperangkat aturannya ini dinilai melanggar hak untuk tidak didiskriminasi, kesetaraan, perumahan yang layak, serta hak persamaan didepan hukum dan perlakuan yang setara di pengadilan. Penggunaan kata *Ghetto* juga memberikan gambaran negatif terutama bagi masyarakat Muslim yang selalu digambarkan sebagai bagian dari masalah. Hal tersebut membuat kemungkinan persepsi buruk bagi masyarakat non-barat dan etnis minoritas di Denmark terutama masyarakat Muslim yang bukan hanya imigran, tetapi juga yang sudah menjadi warga negara Denmark. *Ghetto package*

adalah *textbook* untuk diskriminasi, hasutan, dan kebijakan serta hukuman yang tidak perlu yang berasal dari kebijakan politik daripada pembuatan kebijakan yang sehat (Michela Pugliese, 2022).

Perbedaan pandangan terkait kepercayaan serta perbedaan etnis menjadi akar masalah diskriminasi yang diterima oleh masyarakat Muslim di Denmark. Perselisihan antar-etnis tersebut juga tidak terjadi dengan saling membalas, melainkan masyarakat Muslim di Denmark selalu mendapatkan posisi sebagai korban tanpa dapat melawan. Perselisihan antar-etnis di Denmark memang tidak menguntungkan kelompok masyarakat Muslim karena statusnya sebagai minoritas. Stigma buruk, prasangka, serta diskriminasi yang dapat digolongkan sebagai *Islamophobia* juga selalu terjadi di dalam lapisan masyarakat di Denmark baik berasal dari masyarakat sipil, politisi, bahkan Pemerintah Denmark itu sendiri. Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan politik politisi-politisi di Pemerintahan Denmark yang mendorong pembatasan kebebasan kelompok masyarakat Muslim.

## PENUTUP

*Islamophobia* berangkat dari penolakan terhadap Islam, kelompok, serta individu dengan latar belakang Muslim atas dasar prasangka dan stereotip yang berkemungkinan memiliki elemen emosional, kognitif, evaluatif serta memiliki orientasi berupa tindakan seperti diskriminasi ataupun kekerasan. Dalam kasus di Denmark, masyarakat Denmark bahkan pemerintah kerap kali melakukan tindakan yang ofensif bagi masyarakat Muslim di Denmark yang didominasi oleh imigran dengan didasari oleh prasangka serta perasaan tidak suka terhadap Muslim. Beberapa contoh kasus yang telah dijabarkan diatas menjadi bukti bahwa *Islamophobia* ada dan tumbuh di Denmark. Bukan hanya kekerasan secara fisik,

kelompok masyarakat Denmark juga mencoba untuk membatasi ruang lingkup dan kebebasan masyarakat Muslim di Denmark. Pembatasan ruang ibadah, mempersulit mendapatkan pekerjaan, upaya untuk mendeportasi imigran muslim ke negara asalnya, menolak masuknya imigran maupun pengungsi dengan latar belakang Muslim, bahkan pemberhentian subsidi bagi sekolah yang memiliki murid dengan latar belakang muslim yang banyak di sekolah tersebut. Bentuk-bentuk dari perasaan *Islamophobia* ditunjukkan oleh tindakan-tindakan tersebut.

*Freedom from want* dan *freedom from fear* dalam konsep *human security* sulit untuk didapatkan oleh masyarakat Muslim di Denmark karena mereka selalu mendapatkan kondisi yang tidak baik seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan untuk mendapatkan pendapatan yang layak, selalu dipandang tidak baik karena latar belakang agamanya, selalu mendapatkan gangguan baik fisik dan verbal di dalam lingkungan masyarakat, kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari Pemerintah Denmark, selalu dipojokkan baik oleh masyarakat sipil maupun Pemerintah Denmark. Ada dua komponen utama berdasarkan *UNDP* dalam *human security* yang dibahas dalam penelitian ini. Ancaman bagi *personal security* dengan ancaman seperti penyiksaan fisik dapat dibuktikan dengan kasus Tarek dan Ali, ancaman dari kelompok dan individu lain berupa konflik antar etnis dapat ditunjukkan dari bagaimana respon dan tindakan masyarakat Denmark terhadap masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari, ancaman terhadap perempuan ditunjukkan dari kasus penganiayaan beberapa perempuan Muslim oleh beberapa pria berlatar belakang Denmark, ancaman terhadap anak ditunjukkan dari pelarangan ruang salat di lingkungan sekolah dan pemaksaan untuk menitipkan anak *ghetto*.

Ancaman bagi *community security* merupakan perselisihan antar kelompok yang didasari oleh nilai religius serta identitas yang dibawa masing-masing kelompok ditunjukkan jelas dari bagaimana stigma buruk serta prasangka terhadap Islam mendorong masyarakat sipil, Pemerintah, dan Politisi Denmark dalam tindakan penganiayaan, hinaan bersifat rasis, petisi maupun Undang-Undang yang memberatkan dan sangat merugikan masyarakat Muslim di Denmark. Dalam kasus Denmark ini, banyak ancaman-ancaman bagi dua komponen utama tersebut yang terjadi. Perselisihan antar kelompok masyarakat Denmark dengan kelompok masyarakat Muslim di Denmark yang sebagian besar merupakan imigran. Banyak tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah, politisi, maupun masyarakat sipil Denmark terhadap masyarakat Muslim. Denmark sebagai negara juga tidak dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Muslim yang ada disana, dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang mengekang kebebasan masyarakat Muslim serta pengabaian yang terjadi ketika seseorang dengan latar belakang Muslim mencoba untuk melaporkan tindakan diskriminasi serta kekerasan yang dialaminya. Tindakan-tindakan diskriminasi dan kekerasan dari masyarakat Denmark terhadap masyarakat Muslim yang didasari oleh ketidaksukaan serta stereotip mereka terhadap Islam dan Muslim memberikan dampak serta ancaman bagi *human security* masyarakat Muslim Denmark.

Masih sulit menemukan penelitian yang membahas yang mengaitkan *islamophobia* dengan *human security*. Keterbatasan data dan acuan penelitian menjadi salah satu penyebab minimnya pembahasan serupa, dan sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti untuk membahas isu tersebut. Peneliti berharap akan adanya eksplorasi bagi isu-isu serupa agar

nantinya refrensi dalam pembahasan kasus ini menjadi lebih banyak. Maka dengan begitu, isu-isu terkait *Islamophobia* dan *human security* menjadi lebih mudah untuk dicapai peneliti berikutnya maupun masyarakat umum kedepannya.

## Daftar Pustaka

- 16-ÅRIG TÆVET VED PALÆSTINA-DEMONSTRATION-Politivold mod mor og søn. <https://arkiv.arbejderen.dk/indland/politivold-mod-mor-og-s%C3%B8n>, diakses pada 1 Juni 2022
- Abildgaard, Mikkel & Jørgensen, Julia Friis. Flere muslimer udsættes for hadforbrydelser i Danmark. <https://friisjulia.wixsite.com/hadforbrydelser/baggrunden>, diakses pada 1 Juni 2022
- Alamari, M. F. (2020). IMIGRAN DAN MASALAH INTEGRASI SOSIAL. *Jurnal Dinamika Global*.
- Albrektsen, Thomas. (2018). DF'er Trækker Sig Efter Kontroversielt Facebook-Opslag. <https://www.tv2east.dk/artikel/dfer-traekker-sig-som-formand-efter-kontroversielt-opslag-paa-facebook>, diakses pada 1 Juni 2022
- Bayrakli, Enes. Hafez, Farid. (2018). *European Islamophobia Report 2017*.
- ANDERSEN, JEPPE ELKJÆR. (2017). Kend Dansk Historiker Vender på En Tallerken: Muslimer må Blive Kristine, Ellers Er Vi På. <https://www.bt.dk/danmark/kendt-dansk-historiker-vender-paa-en-tallerken-muslimer-maa-blive-kristne-ellers>, diakses pada 1 Juni 2022
- Auken, Ida. (2019). Ida Auken er rasende: Manden, der kom ind på mit kontor, var tydeligvis idiot!. <https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7416529/Manden-der-kom-ind-p%C3%A5-mit-kontor-var-tydeligvis-idiot>, diakses pada 1 Juni 2022
- Baere, Merle. (2018). Jeg Vil Ikke Behandles Af Sådan En Som Dig. <https://www.information.dk/moti/2018/11/behandle-s-saadan>, diakses pada 1 Juni 2022
- Bayrakli, Enes. Hafez, Farid. (2019). *European Islamophobia Report 2018*.
- Bayrakli, Enes. Hafez, Farid. (2020). *European Islamophobia Report 2019*.

- Berger, Maurits S. (2014). A Brief History of Islam in Europe.
- Birk, Christian. (2017). Bederum er sjældne på offentlige skoler. <https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/bederum-er-sjaeldne-paa-offentlige-skoler>, diakses pada 1 Juni 2022
- Bleich, E. (2012). Defining and researching Islamophobia. *Review of Middle East Studies*.
- Chivurugwi, Josphat. (2016). Rethinking Xenophobia in the Wake of Human Insecurity in South Africa.
- Dahl, Malte & Krog, Niels. (2018). Experimental Evidence of Discrimination in the Labour Market: Intersections between Ethnicity, Gender, and Socio-Economic Status. Department of Political Science, University of Copenhagen, Denmark.
- Demant, F., Maussen, M., & Rath, J. (2007). Muslims in the EU: Cities Report—the Netherlands. Open Society Institute.
- Denmark: *Ghetto* Package is Discriminatory, unnecessarily punitive and counterproductive. (2022). <https://euromedmonitor.org/en/article/4895/Denmark:-Ghetto-Package-is-discriminatory,-unnecessarily-punitive-and-counterproductive>, diakses pada 26 Juni 2022
- Denmark passes law banning burqa and niqab. (2018). <https://www.theguardian.com/world/2018/may/31/denmark-passes-law-banning-burqa-and-niqab>, diakses pada 26 Juni 2022
- Denmark's Plan to Rebrand its Racist "*Ghetto* Package" Will Cause More Housing Evictions. (2022). <https://www.justiceinitiative.org/newsroom/denmarks-plan-to-rebrand-its-racist-Ghetto-package-will-cause-more-housing-evictions>, diakses pada 26 Juni 2022
- Disguised Racism: Denmark's Discriminatory, Punitive and Counterproductive *Ghetto* Package. (2022). Euro-Mediterranean Human Rights Monitor.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya.
- Human Rights in Denmark, <https://www.humanrights.dk/research/about-human-rights/human-rights-denmark>, diakses pada 16 Agustus 2021
- Iryana. Kawasati, Risky. (2020). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.
- Jacobsen, Brian Arly. (2018). Hvor mange muslimer bor der i Danmark?. <https://www.religion.dk/religionsanalysen/hvor-mange-indvandrere-lever-i-danmark>, diakses pada 22 Agustus 2022
- Mas'oeed, Mohtar. (1989). Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis Dan Teorisasi.
- Minardi, Anton & Melinda, Feronika. (2020). The Effect of Islamophobia on The Security of Syria Refugees in Jermany
- Moestrup, Jonas HR & Vesterlund, Peter. (2017). Ny undersøgelse blandt danske muslimer: En tredjedel føler sig set ned på. <https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-06-ny-undersogelse-blandt-danske-muslimer-en-tredjedel-foeler-sig-set-ned-paa>, diakses pada 1 Juni 2022
- Mohammed, Marwan. (2014). Islamophobic Trends in Europe
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- One year on: What happened after Denmark's 'burqa ban' came into force?. (2018). <https://www.thelocal.dk/20190801/one-year-on-denmarks-burqa-ban-has-resulted-in-23-fines/>, diakses pada 14 Juni 2022
- Pratt, D., & Woodlock, R. (Eds.). (2016). Fear of Muslims?: International Perspectives on Islamophobia. Springer.
- United Nations Development Programme, "Human Development Report 1994", [http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr\\_1994\\_en\\_complete\\_nostats.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf), diakses pada 26 Maret 2021
- Versi, Jamila. (2020). *Denmark's "Ghetto Plan" and The Communities it Targets*. <https://www.aljazeera.com/features/2020/1/15/denmarks-ghetto-plan-and-the-communities-it-targets>, diakses pada 22 Agustus 2022
- Women defiant as Danish ban on full-face veil takes effect. (2018). <https://www.thelocal.dk/20180801/women-defiant-as-danish-ban-on-full-face-veil-takes-effect/>, diakses pada 26 Juni 2022